

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PENGAWASAN DAN
PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN**

(Studi empiris pada SKPD di Kabupaten Karanganyar)

Oleh :

UMI SHOLEKAH

(20150420009)

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email :

Ummicemblexx@gmail.com

ABSTRACT

This study is to prove empirical evidence of the Effect of Accountability, Transparency, Community Monitoring and Participation on Budget Performance in the Karanganyar Regency Government. The sample in this study uses the Purposive sampling method. The sample in this study is the Regional Government Work Unit (SKPD) of Karanganyar Regency with a total of 26 SKPD. This study uses multiple linear regression because it wants to examine the effect of several independent variables on the dependent variable.

From the results of multiple linear regression using SPSS version 15.0, the results of this study indicate that accountability, transparency and participation in agriculture have a positive effect on budget performance, while supervision has no effect on budget performance in SKPD of Karanganyar Regency. The higher the level of accountability, transparency, supervision and budget participation, the better the performance of the government.

Keywords: Accountability, Transparency, Supervision, Budget Participation, Budget Performance

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik berarti akuntansi pemerintahan, sehingga akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisa akuntansi dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial maupun proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Menurut PP No. 101 tahun 2000, *good governance* adalah pemerintah yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. *Good governace* ini juga merupakan suatu konsep yang dalam proses menetapkan keputusan dan dalam melaksanakannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama, yang dilakukan oleh seluruh lapisan baik dari pemerintah hingga ke masyarakat.

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah “pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD” telah menetapkan penggunaan menggunakan pendekatan penganggaran. Pasal 6 dalam undang-undang tersebut juga telah menjelaskan mengenai wewenang satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam hal pengelolaan keuangan di daerah. SKPD merupakan salah satu bagian dari sektor publik yang sering disoroti karena pengelolaan anggaran yang kurang efesien, seperti adanya kebocoran dana, pemborosan serta sering merugi .

Akuntabilitas sektor publik disini tidak semata-mata hanya untuk meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, serta menghindari adanya penyelewengan anggaran namun dapat pula meningkatkan kinerja pemerintah. Akuntabilitas dan transparansi memiliki karakter yang berbeda, namun dalam penerapannya akuntabilitas memiliki kaitan dengan transparansi (Shende dan Bennett, 2004).

Untuk mewujudkan tercapainya pengelolaan anggaran yang baik maka hal tersebut tidak terlepas dari adanya pengawasan yang baik pula, yang dilakukan langsung oleh atasan pengguna anggaran itu sendiri (pengawasan melekat). Selain diawasi oleh atasan pengguna anggaran maka pengawasan juga harus dilakukan oleh lembaga legislatif dan lembaga yang secara khusus bertugas untuk mengawasi dan mengontrol dari mulai proses perencanaan dan pengelolaan anggaran. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah perencanaan anggaran yang telah disusun sebelumnya dapat berjalan secara efektif, efisien, serta ekonomis. Dalam penelitian Fernandes (2015) menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran .

Partisipasi dalam penyusunan anggaran lebih pada proses pengevaluasian kinerja pada individu dan menetapkan penghargaan atas dasar sasaran yang telah dicapai serta keterlibatan dan pengaruh pada individu dalam penyusunan anggaran. Partisipasi dalam penyusunan anggaran lebih memungkinkan bagi para manajer (sebagai bawahan) untuk melakukan negosiasi dengan atasan mereka mengenai

kemungkinan target anggaran yang dapat dicapai. Partisipasi disini ialah partisipasi aparat pemerintah daerah dalam proses penyusunan anggaran, memungkinkan terjadinya komunikasi yang semakin baik, interaksi satu sama lain serta menciptakan proses bekerja sama dalam tim, sehingga berdampak baik pada proses pencapaian tujuan dari anggaran .

Apabila tujuan dari anggaran tercapai, maka pengelolaan anggaran memungkinkan dapat dikatakan baik. Dengan adanya pengelolaan anggaran yang baik maka akan berpengaruh pada kelangsungan dan kesejahteraan hidup masyarakat luas, pengelolaan anggaran yang baik merupakan salah satu prinsip dari *value for money*, dan sesuatu yang mutlak untuk dilakukan. *value for money* merupakan prinsip pengelolaan anggaran sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama yaitu, ekonomis, efisien, dan efektif. Dalam pengelolaan anggaran sangat erat kaitannya dengan *value for money*, hal ini dikarenakan masih banyaknya biaya tinggi, namun hasilnya minim, serta anggaran yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan atau prioritas hingga pemborosan dalam anggaran.

Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus-kasus KKN (Korupsi, Kolusi, Nipotisme) khususnya Korupsi, contohnya Bupati Karanganyar periode 2008-2013, Ibu Rina Iriani Sri Ratnaningsih, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi dengan modus menyalahgunakan anggaran subsidi perumahan dari Kementerian Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2007-2008 untuk proyek perumahan Griya Lawu Asri (GLA), yang mana telah merugikan negara sebesar 18,4 miliar. (<https://nasional.tempo.co/read/709099/ma>

[-perberat-vonis-eks-bupati-rina-iriani-jadi-12-tahun-bui/full&view=ok](https://perberat-vonis-eks-bupati-rina-iriani-jadi-12-tahun-bui/full&view=ok))

Kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat terbang di Taman Wisata Edukasi Dirgantara (Edupark) 2018 dimana dari hasil korupsi tersebut merugikan keuangan negara sebesar 509 juta, pelaku Purwono merupakan salah satu pegawai di SKPD Kabupaten Karanganyar. Persidangan atas kasus korupsi ini masih berlanjut hingga tahap ke 2, yang mana pada tahap pertama telah menetapkan 2 tersangka yaitu Direktur CV Gama Putra Persada Berdy dan Direktur CV Gema Putra Persada Syarifudin yang menjadi rekanan pengadaan pesawat, keduanya divonis satu tahun tiga bulan penjara dengan denda 50 juta subsider tiga bulan kurungan.

Pengandan pesawat terbang tersebut dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi, yang mana pesawat yang didatangkan adalah pesawat Boeing 737-300, seharusnya pesawat yang didatangkan adalah type 737-200. Jilid 2 dalam kasus ini telah menetapkan 5 orang tersangka yaitu, Istriadi Purtanto, Yulianti Nugraheni, Jalu Setio Bintoro, Bina Febrianto, dan Giyarto. (<https://soloraya.solopos.com/read/20181114/494/952561/kasus-edupark-karanganyar-jilid-ii-segera-disidangkan>)

Hal ini biasa terjadi dari awal penyusunan anggaran yang mana oknum-oknum tertentu telah menyusun strategi untuk melancarkan aksinya untuk melakukan tindak korupsi atau penyelewengan anggaran. Dari beberapa kasus tersebutlah yang menyebabkan lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini, dan akibat dari peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah belum maksimal, karena belum berjalannya perencanaan dan

sistem pengendalian yang baik, menurut peneliti perlu adanya akuntabilitas, transparansi, pengawasan serta partisipasi anggaran untuk menunjang terciptanya kinerja yang lebih baik.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Fernandes (2015) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi dan waktu penelitian serta adanya penambahan variabel independen yaitu partisipasi anggaran. Yang mendasari penelitian ini karena beberapa kasus korupsi yang terjadi pada pemerintahan Kabupaten Karanganyar, khususnya kasus korupsi bupati Karanganyar pada periode 2008-2013.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, rumusan masalah dari penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran pada SKPD Kabupaten Karanganyar ?
2. Apakah transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran pada SKPD Kabupaten Karanganyar ?
3. Apakah pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran pada SKPD Kabupaten Karanganyar?
4. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran pada SKPD Kabupaten Karanganyar ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan bukti empiris :

1. Pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran pada SKPD Kabupaten Karanganyar
2. Pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran pada SKPD Kabupaten Karanganyar
3. Pengaruh pengawasan terhadap kinerja anggaran pada SKPD Kabupaten Karanganyar
4. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja anggaran pada SKPD Kabupaten Karanganyar

Landasan Teori

Teori Stewardship

Dalam penelitian ini *grand* teori yang digunakan adalah teori *stewardship*. Teori ini menjelaskan situasi dimana manajemen tidak mempunyai motivasi untuk tujuan pribadi namun lebih ditunjukkan pada tujuan atau kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1991). Para eksekutif dalam organisasi, yang mana dalam kasus ini adalah kepala SKPD dan seluruh anggotanya sebagai steward atau pelayan yang mempunyai motivasi untuk bertindak sesuai keinginan principal yaitu masyarakat.

Teori ini cocok digunakan untuk sektor publik karena dari segi aspek tujuannya, dimana dalam sektor publik tidak mengedepankan keuntungan sebanyak-banyaknya namun lebih menekankan pada fungsi pelayanan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu teori ini dirasa cocok dikaitkan dengan kinerja anggaran karena, dengan penyusunan anggaran yang baik maka diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas kinerja anggaran yang baik, tanpa ada kebocoran dana . Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bekerja pada sektor publik akan lebih mengutamakan

kepentingan orang lain dibandingkan dengan kepentingan individu atau pribadi yang lebih menguntungkan.

Kinerja Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu dimasa yang akan datang (Munandar. 2001:1). Dari definisi diatas menunjukkan dimana anggaran mendefinisikan rencana organisasi dalam satuan keuangan. Sedangkan menurut Ikhsan (2009:173) “Anggaran merupakan perencanaan manajerial untuk melakukan suatu tindakan dalam ungkapan-ungkapan keuangan, anggaran merupakan istilah singkat dari perencanaan laba yang terpadu dan meliputi pilihan-pilihan manajemen dan tujuan-tujuan terhadap organisasi dan penyediaan dana sebagai saah satu acuan dalam menjalankan operasional sehari-hari”.

Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah merupakan salah satu kewajiban dalam pertanggungjawaban suatu keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum pada setiap pengelolaan anggaran sering kali dikaitkan dengan akuntabilitas publik tersebut, yang dimana hal ini dapat dilihat dari pengertian akuntabilitas.

“Menurut Mahmudi (2010:23) akuntabilitas merupakan kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan

dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal)”.

Transparansi

Selain akuntabilitas dalam siklus anggaran juga terdapat transparansi, yang mana transparansi juga sangat diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. buat, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat dan DPRD. Transparansi ini pula bisa bermakna sebagai penyedia informasi yang cukup akurat dan tepat waktu sesuai kebijakan publik, dengan adanya informasi maka masyarakat dapat sekaligus hadir dalam proses pengawasan sehingga kebijakan publik yang ada bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta meminimalisir terjadinya, manipulasi ataupun kecurangan yang dimana hal ini hanya akan menguntungkan salah satu pihak atau salah satu kelompok. Transparansi adalah bentuk keterbukaan kebijakan-kebijakan yang pemerintah dan tidak proporsional.

Pengawasan

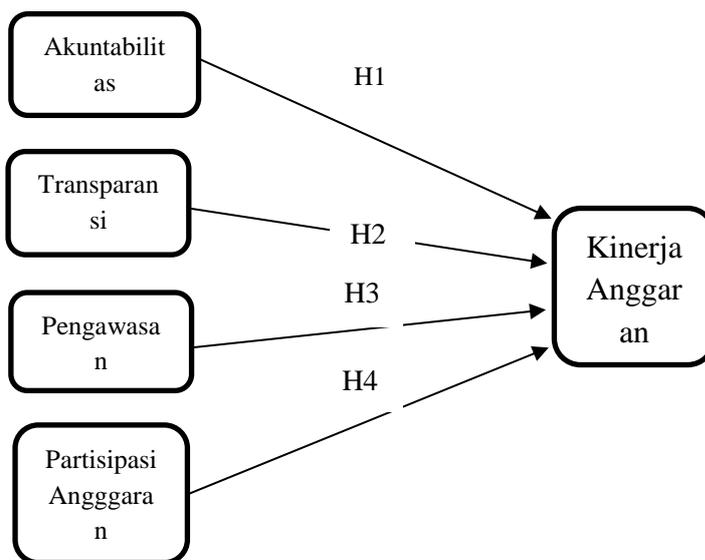
“Pengawasan adalah sebuah proses pemantauan kegiatan untuk menjaga bahwa dalam suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan dengan adanya penilaian, tindakan kooperatif terhadap kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau kurang tepat dengan sasaran yang ingin dituju (Sukirno, 2004:99). Dalam Keputusan Presiden No, 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Partisipasi Anggaran

Partisipasi aparat pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran, memungkinkan terjadinya komunikasi yang semakin baik, interaksi satu sama lain serta menciptakan proses bekerja sama dalam tim. Hal ini berdampak baik dalam pencapaian tujuan dari anggaran. Partisipasi penyusunan anggaran secara langsung akan mendorong aparat pemerintah untuk dapat ambil bagian dalam proses pengambilan sebuah kebijakan melalui organisasi terhadap target anggaran.

Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau sekarang lebih dikenal dengan Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) pada Kabupaten Karanganyar yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, yang termasuk didalam SKPD yaitu Badan, Dinas, Kecamatan, Sekretaris Daerah, dan SKPD lainnya. Kriteria responden dalam penelitian ini yaitu Kepala SKPD dan Bagian keuangan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu dimana peneliti menetapkan kriteria khusus, yang mana kriteria dalam penelitian ini adalah Kepala SKPD dan Bagian keuangan yang telah bekerja minimal 1 tahun. Dalam kuesioner tersebut terdapat 42 item pertanyaan dari 4 variabel independen dan 1 variabel dependen.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebar kuesioner secara langsung pada SKPD Kabupaten Karanganyar, penyebaran kuesioner ini dilakukan pada tanggal 21 – 29 Maret 2019. Kuesioner yang disebar yaitu sebanyak 130 kuesioner, yang kembali 111 kuesioner hal ini dikarenakan kurangnya kontrol dari peneliti sehingga ada beberapa kuesioner yang hilang saat proses pengisian pada SKPD, dan yang dapat diolah yaitu sebanyak 100 kuesioner.

1. Statistik Deskriptis Variabel Penelitian

Hasil uji statistik deskriptif variabel penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini, sebagai berikut :

Tabel 4.8
Hasil Uji statistik deskriptif

Variabel	Kisaran Teoritis			Kisaran Aktual		
	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean
Akuntabilitas	9	45	27	21	41	30,1600
Transparansi	9	45	27	20	38	28,5500
Pengawasan	9	45	27	21	45	35,3100
Partisipasi Anggaran	6	30	15	10	26	16,6400
Kinerja Anggaran	9	45	27	20	39	31,3400

Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2019

Uji Validitas Data

Uji validitas data menggunakan *Kaiser Meyser Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA)*, pertanyaan pada kuesioner dapat dikatakan valid jika telah memenuhi syarat jika nilai $KMO > \alpha$ 0,5. Berikut hasil pengujian validitas pada semua variabel (Y) Kinerja Anggaran, (X1) Akuntabilitas, (X2) Transparansi, (X3) Pengawasan, dan (X4) Partisipasi Anggaran, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 4.9
Hasil uji validitas data

Butir pertanyaan	Kinerja Anggaran (KMO : 0,889)	Akuntabilitas (KMO : 0,786)	Transparansi (KMO : 0,796)	Pengawasan (KMO : 0,661)	Partisipasi Anggaran (KMO : 0,840)	Keterangan
1	0,422	0,500	0,794	0,671	0,597	Valid
2	0,427	0,595	0,828	0,650	0,818	Valid
3	0,848	0,771	0,796	0,677	0,661	Valid
4	0,801	0,563	0,756	0,766	0,716	Valid
5	0,744	0,728	-	0,680	0,588	Valid
6	0,574	0,755	-	0,576	-	Valid

Sumber : Output data yang diolah, 2019

Uji Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas instrumen menggunakan *Cronbach Alpha*. Caranya adalah dari data yang dikumpulkan tersebut akan diolah lebih lanjut. Apabila nilai perhitungan *cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6 maka dapat dikatakan data tersebut

reliabel. Hasil Pengujian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.10
Hasil uji reliabilitas Instrumen

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kinerja Anggaran	0,714	Reliabel
Akuntabilitas	0,695	Reliabel
Transparansi	0,663	Reliabel
Pengawasan	0,737	Reliabel
Partisipasi Anggaran	0,744	Reliabel

Sumber : Output data yang diolah, 2019

Uji Normalitas

Uji normalitas ini menggunakan *one-sample Kolmogorov-Smirnow test (K-S)*, yang mana jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05* maka data berdistribusi secara normal. Berikut tabel hasil uji normalitas :

Tabel 4.11
Hasil uji normalitas

Keterangan	Unstandardized Residual
Sig	0,118

Sumber: data yang diolah 2019

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya variabel independen yang memiliki kesamaan antara variabel independen dalam satu model. Uji regresi ini dapat dikatakan bebas multikolinieritas jika, memiliki nilai $VIF < 10$ dan nilai $tolerance > 0,10$ (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Dibawah ini merupakan tabel dari uji multikolinieritas :

Tabel 4.12
Hasil uji multikolinieritas

Variabel Independen	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Akuntabilitas	5,415	0,000	Tidak terjadi multikolinieritas
Transparansi	0,892	0,375	Tidak terjadi multikolinieritas
Pengawasan	0,212	0,833	Tidak terjadi multikolinieritas
Partisipasi Anggaran	3,366	0,001	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber : data yang diolah, 2019

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi ini dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan metode pengujian heteroskedastisitas dengan uji glejser yang mana meregresi uji absolut residual dengan variabel bebas yang digunakan, dengan syarat agar dapat dikatakan tidak terjadinya heteroskedastisitas ialah apabila nilai $\text{sig} > \text{Alpha } 0,05$ (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Berikut adalah hasil dari uji heteroskedastisitas :

Tabel 4.13
Hasil uji heteroskedastisitas

Mode		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	56,559	4	14,140	3,394	,012(a)
	Residual	395,736	95	4,166		
	Total	452,294	99			

Sumber : data yang diolah, 2019

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Uji koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent mampu menjelaskan variabel dependen yang mana dapat dilihat dari nolai koefisien determinasi (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Berikut ini adalah hasil pengujian

dari uji koefisien determinasi, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.14
Hasil uji koefisien determinasi R^2

Model	<i>Adjusted R²</i>
1	0,358

Sumber : Output data yang diolah, 2019

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Uji koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent mampu menjelaskan variabel dependen yang mana dapat dilihat dari nolai koefisien determinasi (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Berikut ini adalah hasil pengujian dari uji koefisien determinasi, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.14
Hasil uji koefisien determinasi R^2

Model	<i>Adjusted R²</i>
1	0,358

Sumber : Output data yang diolah, 2019

Uji *t*

Berikut adalah hasil uji nilai *t*, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.16
Hasil uji *t*

Model	<i>Beta</i>	Sig.
Constant	8,169	0,038
AKTB	0,485	0,000
TPRN	0,089	0,037
PGWSN	0,020	0,833
PA	0,319	0,001

Sumber : Output data yang diolah, 2019

Uji Hipotesis 1 (X1)

Berdasarkan tabel 4.16 diatas maka dapat dilihat bahwa variabel akuntabilitas memiliki nilai signifikan $0,000 < \alpha 0,05$ dengan koefisien sebesar 0,485, maka dengan begitu dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran, maka hipotesis pertama diterima .

Uji hipotesis 2 (X2)

Berdasarkan tabel 4.16 diatas menunjukkan bahwa variabel transparansi memiliki nilai signifikan $0,037 < \alpha 0,05$ dengan koefisien sebesar 0,089 yang berarti bahwa variabel transparansi ini berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran maka hipotesis kedua (X2) diterima.

Uji hipotesis 3 (X3)

Berdasarkan tabel 4.16 diatas dapat dilihat bahwa variabel pengawasan memiliki nilai signifikan $0,833 > \alpha 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar 0,020, dapat disimpulkan bahwa pengawasan tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran, maka hipotesis ketiga (X3) ditolak.

Uji hipotesis 4 (X4)

Berdasarkan tabel 4.16 diatas menunjukkan bahwa variabel partisipasi anggaran memiliki nilai signifikan $0,001 < \alpha 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar 0.319, dari angka tersebut maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran maka hipotesis keempat (X4) diterima .

Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan partisipasi anggaran terhadap kinerja anggaran. Dari hasil pengujian hipotesis yang telah diatas dengan responden yaitu bagian keuangan dan kepala SKPD, dapat dilihat bahwa ada satu variabel independen yang tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja anggaran yaitu variabel pengawasan, sedangkan tiga variabel independen lainnya yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja anggaran.

Dari hasil penelitian diatas maka benar bahwa teori stewardship sangat cocok digunakan dalam sektor publik, karena pada penerapannya teori dan sektor publik pada pemerintahan yang mana sangat mengedepankan fungsi pelayanan masyarakat, dibandingkan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya.

1. *Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran*

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran, hal ini memperlihatkan bahwa sebuah organisasi telah membuat laporan keuangan secara akuntabel, tepat waktu dan sebagaimana mestinya. Akuntabilitas pada pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban, untuk sebuah keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan dalam mencapai tujuan

maupun sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Terwujudnya akuntabilitas yang baik merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik, dengan akuntabilitas ini maka pengguna laporan keuangan dan masyarakat dapat mengetahui tingkat tercapainya tujuan dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wanda (2015), Pertiwi (2015).

2. *Transparansi terhadap Kinerja Anggaran*

Berdasarkan dari penelitian diatas, menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Semakin tinggi tingkat transparansi pada suatu organisasi maka tingkat kepercayaan masyarakat pun akan semakin meningkat, dengan adanya transparansi ini maka akan memudahkan para pengguna atau pemakai laporan keuangan tersebut.

Hal ini juga mendukung akuntabilitas yang tinggi maka haruslah diiringi dengan transparansi yang baik pula sehingga mewujudkan kinerja yang baik pada organisasi tersebut, khususnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini penelitian dari Coryanata (2012).

3. *Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran*

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas, menunjukkan bahwa pengawasan tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran, hal ini dikarenakan ada atau tidak adanya pengawasan tidak mempengaruhi kinerja pemerintah. Karena kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah karanganyar telah dilakakukan dengan baik melalui akuntabilitas dan transparansi .

Penelitian ini tidak mendukung penilitian Sari (2015), Setiawan dan Safri (2016).

4. *Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Anggaran*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran, hal ini dikarenakan dengan adanya partisipasi anggaran maka pegawai akan merasa dianggap dalam penyusunan anggaran dengan adanya partisipasi mereka, dan dalam pelaksanaanya pegawai terlibat dalam penyusunan anggaran. Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Sumbang (2006) dan Cahyani (2010).

SARAN

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberpa saran, yaitu :

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan menbahkan metode wawancara guna memperoleh data yang lebih valid dan lengkap.

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas atau menambahkan obyek penelitian, bukan hanya dari satu tempat namum dua atau tiga tempat sebagai perbandingan atau perbandingan antara kabupaten yang maju dan masih tertinggal.

3. Penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan waktu pelaksanaan penelitian dan penyebaran kuesioner karena dengan jangka waktu 1 minggu dirasa kurang efektif karena waktu yang singkat

4. Penelitian selanjutnya bisa lebih mengontrol saat responden malukukan pengisian responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugriyani, R. M. (2014). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value . *Skripsi FEB Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Arifani, C. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Cahyani, K. N. (2010). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Organisasi Dan Persepsi Inovasi Sebagai Variabel Intervening . *Skripsi FE UNDIP*.
- Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah Vol 13 No 1*, 68-82.
- Catharina Lindstendt, D. N. (2010). *Transparency is not Enough : Making Transparency Effective in Reducing Corruption* . Diambil kembali dari International Political Science Review.
- Coryanata, I. (2012). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi Vol 12 No 2*, 110-125.
- Danolson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory And Agency Theory : CEO Governance And Shareholder Return. *Australian Journal Of Management Vol*.
- Fernnades, W. (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. *Jom FEKON vol 2 No 2*.
- Hunt, G. (2006). The Principle of Complementarity : Freedom of Information, Public Accountability and Whistleblowing. Dalam *Freedom in Information : Prespective Open Government in a Theoretical and Partical Context*.
- <https://nasional.tempo.co/read/709099/m-a-perberat-vonis-eks-bupati-riani-jadi-12-tahun-bui/full&view=ok>
- <https://soloraya.solopos.com/read/20181114/494/952561/kasus-edupark-karanganyar-jilid-ii-segera-disidangkan>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/57264/keppres-no-74-tahun-2001>
- Mahmudi, M. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Ke-2*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Meutia, Rita, & Nurfitriana. (2016). Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Aceh. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Vol 1.2*.
- Nazaruddin, I., & Basuki, A. T. (2017). *Analisis Statistik Dengan SPSS*. Yogyakarta: Danisa Media.

- Peraturan Pemerintah No 101. (2000).
- Pertiwi, D. P. (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah (Studi Empiris SKPD Provinsi Riau). *Jom FEKOM Vol 2 No 2*.
- Sari, D. (2013). Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntansi Pertanggungjawaban terhadap Kinerja Manajerial PT POS Indonesia. *e-Jurnal Binar Akuntansi Vol 2 No 1*.
- Sari, R. N. (2015). Pengaruh Pengawasan Inspektorat Dan Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar). *Skripsi Universitas Negeri Padang*.
- Setiyawan, H. E., & Safri, M. (2016). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembanguna Daerah Vol 4 No 1*.
- Shende, S. a. (2004). Dalam U. DESA, *Concept Paper 2 : Transparency and Accountability in Public Financial Administration*.
- Sikorno, S. (2004). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Siregar, L. (2011). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Moderator Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar. *Tesis Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*.
- Soobaroyen, T. (2005). Management Control System and Disfunctional Behavioran Emprical Investigation . *United Kingdom, University of Wale*.
- Suharsih. (2019, Januari 5). *Solopos*. Diambil kembali dari Soloraya: <https://soloraya.solopos.com/read/20181114/494/952561/kasus-edupark-karanganyar-jilid-ii-segera-disidangkan>
- Sumbang, A. (2006). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Ketidakpastian Lingkungan Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Kota Semarang). *Skripsi FEB UNIKA Sugijapranata*.
- Ulupui, I. (2005). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Persepsi Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural Dan Goal Commitment Terhadap Kinerja Dinas . *Jurnal Kinerja Vol 9 No 2*, 98-112.
- Undang-Undang No 1. (2004).
- Utami, P. (2019, Januari 8). *Kompas*. Diambil kembali dari Regional Kompas: <https://regional.kompas.com/read/2013/11/14/1328473/Bupati.Karanganyar.Tersangka.Korupsi.Rp.11.1.Miliar>

Wulandari, N. (2013). Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang). *Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.*